

Digitalisasi Administrasi Pertanahan Desa melalui Pendampingan Mahasiswa KPM di Desa Gintungan

Della Amania Fitry ^{*1}

Rulan Indriana ²

Khanif Mursidah ³

Tivany Maulin ⁴

Samsul Munir ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia

*e-mail: dellafitry19@gmail.com¹, gulanindriana@gmail.com², khanifmursyidah@gmail.com³,
beigeforrain@gmail.com⁴, samsulmunir@unsiq.ac.id⁵

Abstrak

Administrasi pertanahan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tertib administrasi, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan desa. Namun demikian, di Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, pendataan sertifikat tanah masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan kendala dalam pencarian data, potensi kesalahan pencatatan, serta risiko kehilangan arsip. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan digitalisasi administrasi pertanahan desa melalui pendampingan mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dengan memanfaatkan Microsoft Excel sebagai media pendataan digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa, perancangan format pendataan sertifikat tanah berbasis Excel, pelatihan penggunaan sistem, serta pendampingan migrasi data dari arsip manual ke sistem digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan pendataan sertifikat tanah berbasis Excel dapat membantu meningkatkan keteraturan administrasi pertanahan dan mempermudah proses pencarian data. Selain itu, pendampingan yang dilakukan berkontribusi pada peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi pertanahan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, digitalisasi administrasi pertanahan melalui pendampingan mahasiswa KPM berpotensi mendukung perbaikan tata kelola administrasi desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata kunci: Digitalisasi Administrasi, Pertanahan Desa, Pendampingan; Microsoft Excel, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)

Abstract

Village land administration is one of the important aspects in supporting administrative order, public services, and village development planning. However, in Gintungan Village, Gebang Subdistrict, Purworejo Regency, land certificate data management is still conducted manually, resulting in difficulties in data retrieval, potential recording errors, and risks of archive loss. This community service activity aims to describe the implementation of village land administration digitalization through the assistance of students participating in the Community Service Program (KPM) by utilizing Microsoft Excel as a digital data management tool. The method employed is a descriptive qualitative approach involving field observations, interviews with village officials, the design of an Excel-based land certificate data format, system usage training, and assistance in migrating data from manual archives to a digital system. The results indicate that the implementation of Excel-based land certificate data management can help improve the organization of land administration records and facilitate data retrieval processes. Furthermore, the assistance provided contributes to enhancing the capacity of village officials in managing land administration using information technology. Thus, the digitalization of land administration through student assistance has the potential to support improvements in village administrative governance and the quality of public services.

Keywords: Administrative Digitalization, Village Land Administration, Assistance, Microsoft Excel, Community Service Program (KPM)

PENDAHULUAN

Pengelolaan administrasi pertanahan di tingkat desa memegang peranan penting dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi pertanahan yang

tertata dengan baik berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, mendukung perencanaan pembangunan berbasis wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik desa. Ketersediaan data pertanahan yang sistematis dan akurat menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam mengelola aset desa, merumuskan kebijakan pembangunan, serta menangani permasalahan pertanahan yang muncul di tingkat lokal (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Selain sebagai instrumen administratif, tertib administrasi pertanahan desa juga merefleksikan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam setiap proses pengelolaan administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan data pertanahan. Pengelolaan administrasi pertanahan yang dilakukan secara tertib dan sistematis memungkinkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta mendukung efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, administrasi pertanahan desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan data, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan desa dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal (Dwiyanto, 2018).

Desa Gintungan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, merupakan wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan permukiman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, sebagian besar penduduk di wilayah pedesaan menggantungkan aktivitas ekonomi pada pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan, sehingga keberadaan data pertanahan yang akurat menjadi kebutuhan administratif yang sangat penting (BPS Kabupaten Purworejo, 2023). Dalam konteks tersebut, administrasi pertanahan desa memiliki peran strategis sebagai dasar pelayanan publik dan perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Namun demikian, kondisi empiris di Desa Gintungan menunjukkan bahwa pendataan sertifikat tanah masih dilakukan secara manual melalui arsip fisik berupa buku register dan dokumen cetak. Sistem pencatatan manual ini belum terintegrasi dalam satu basis data yang sistematis dan mudah diakses. Akibatnya, proses pencarian data membutuhkan waktu yang relatif lama, berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, serta memiliki risiko kehilangan atau kerusakan arsip. Permasalahan ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik desa, khususnya dalam pelayanan administrasi yang berkaitan dengan data kepemilikan tanah masyarakat.

Pendataan sertifikat tanah secara manual juga menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan pemetaan data pertanahan secara menyeluruh. Padahal, ketersediaan data pertanahan yang valid dan terbaru sangat dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pemerintah desa dituntut untuk memiliki data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi administrasi pemerintahan desa menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Digitalisasi administrasi pertanahan memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, sistematis, dan berkelanjutan. Data yang tersimpan secara digital lebih mudah diakses, diperbarui, dan diamankan, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik desa. Selain itu, digitalisasi juga sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo yang mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis data dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Pemerintah Kabupaten Purworejo, 2022).

Dalam konteks Desa Gintungan, penerapan digitalisasi administrasi pertanahan melalui pemanfaatan Microsoft Excel dipandang sebagai langkah awal yang realistis dan aplikatif. Penggunaan Excel sebagai media pendataan dinilai sesuai dengan kondisi sumber daya manusia dan infrastruktur desa yang masih terbatas, namun tetap mampu menghasilkan basis data pertanahan yang terstruktur dan mudah dikelola. Digitalisasi ini diharapkan dapat mendukung tertib administrasi desa serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan publik di bidang

pertanahan. Dalam proses digitalisasi administrasi pertanahan desa, mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) berperan sebagai agen pendamping dan fasilitator dalam penerapan teknologi administrasi desa. Melalui kegiatan KPM, mahasiswa berkontribusi dalam proses alih pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi kepada perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi pertanahan berbasis digital (Widjajanti, 2016). Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi perancangan format pendataan sertifikat tanah berbasis Microsoft Excel, pelatihan penggunaan aplikasi, serta pendampingan dalam proses migrasi data dari sistem pencatatan manual ke sistem digital.

Peran mahasiswa KPM tersebut sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yang menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola administrasi pemerintahan secara mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penguasaan teknologi informasi, tetapi juga diarahkan pada penguatan kesadaran dan pemahaman perangkat desa mengenai pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan akuntabel. Pendekatan pemberdayaan ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan (Suharto, 2017). Pendampingan digitalisasi administrasi pertanahan di Desa Gintungan juga mendukung implementasi kebijakan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib administrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya data pertanahan yang lebih rapi dan terintegrasi, pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung perencanaan pembangunan desa yang berbasis data.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan digitalisasi administrasi pertanahan desa melalui pendampingan mahasiswa KPM di Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pendataan sertifikat tanah secara manual, menjelaskan proses perancangan dan implementasi pendataan sertifikat tanah berbasis Microsoft Excel, serta menganalisis dampak digitalisasi terhadap tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan rancangan kualitatif deskriptif dengan pendekatan pendampingan partisipatif yang dilaksanakan di Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM). Sasaran kegiatan ditetapkan secara purposive, yaitu perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi awal pendataan sertifikat tanah, wawancara semi-terstruktur dengan perangkat desa guna menggali prosedur administrasi dan kendala yang dihadapi, serta dokumentasi terhadap arsip pertanahan desa. Berdasarkan data tersebut, dikembangkan instrumen berupa format pendataan sertifikat tanah berbasis Microsoft Excel yang disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan kemampuan sumber daya manusia desa, disertai pendampingan berupa pelatihan penggunaan sistem dan migrasi data dari arsip manual ke format digital. Data hasil kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses pelaksanaan pendampingan serta dampak digitalisasi terhadap tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Gintungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Administrasi Pertanahan Desa

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, diketahui bahwa pendataan sertifikat tanah sebelumnya masih dilakukan secara manual. Data pertanahan dicatat dalam buku register dan disimpan dalam bentuk arsip fisik yang belum terintegrasi dalam satu sistem pendataan yang

sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian data membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan data kepemilikan tanah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pencatatan manual sering menimbulkan kendala berupa ketidakteraturan arsip, potensi kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam memperbarui data sertifikat tanah. Perangkat desa menyampaikan bahwa arsip yang tersimpan dalam jangka waktu lama berisiko mengalami kerusakan atau kehilangan, sehingga menyulitkan pemerintah desa dalam memastikan keakuratan data pertanahan. Selain itu, keterbatasan sistem pendataan juga menghambat perangkat desa dalam menyusun laporan administrasi dan mendukung perencanaan pembangunan desa yang membutuhkan data pertanahan yang akurat.

Dampak dari kondisi tersebut dirasakan langsung dalam pelayanan publik desa. Berdasarkan hasil observasi, pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara cepat dan efisien karena perangkat desa harus menelusuri arsip fisik secara manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan Desa Gintungan sebelum digitalisasi belum sepenuhnya mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan upaya pembenahan melalui

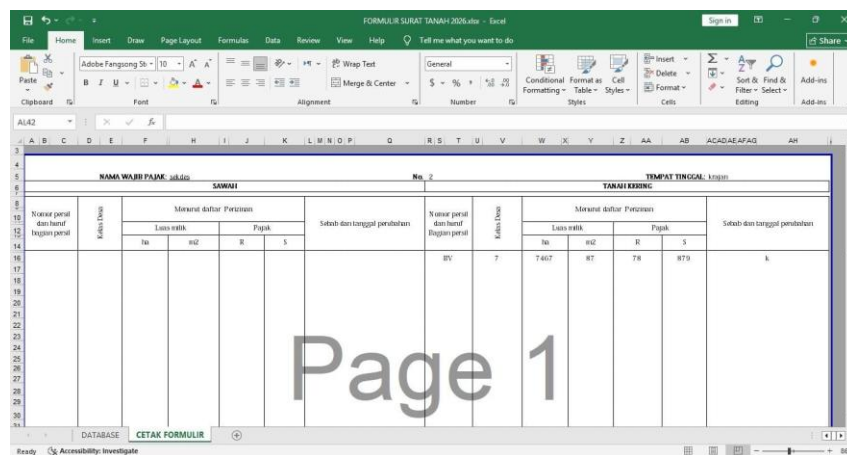
2. Perancangan Format Pendataan Sertifikat Tanah Berbasis Excel

Perancangan format pendataan sertifikat tanah dalam kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan Microsoft Excel sebagai media digitalisasi arsip administrasi pertanahan desa. Pemilihan Microsoft Excel didasarkan pada pertimbangan kebutuhan sistem yang bersifat sederhana, mudah dioperasikan, serta sesuai dengan kemampuan perangkat desa sebagai pengguna utama. Selain itu, Excel tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan maupun koneksi internet dalam pengoperasiannya, sehingga dinilai relevan dengan kondisi infrastruktur teknologi informasi di Desa Gintungan yang masih terbatas. Karakteristik tersebut menjadikan Excel sebagai perangkat lunak yang fleksibel dan aplikatif untuk mendukung proses digitalisasi administrasi pertanahan pada skala desa.

Desain format Excel disusun dengan mengadaptasi bentuk formulir administrasi pertanahan manual yang selama ini digunakan oleh pemerintah desa. Pendekatan adaptif ini dilakukan agar perangkat desa tidak mengalami kesulitan dalam memahami alur kerja sistem baru, serta untuk meminimalkan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Dengan mempertahankan struktur pengisian data yang telah familiar, proses transisi menuju sistem digital dapat berlangsung secara lebih bertahap dan terkontrol. Format pendataan dirancang dalam dua lembar kerja utama, yaitu lembar formulir pendataan dan lembar basis data. Lembar formulir berfungsi sebagai antarmuka utama yang digunakan perangkat desa dalam melakukan input, pencarian, dan penelusuran data pertanahan. Informasi yang dicantumkan pada lembar ini mencakup identitas wajib pajak, alamat tempat tinggal, jenis tanah, nomor persil, kelas desa, luas tanah, besaran pajak, serta keterangan perubahan data yang relevan dengan administrasi pertanahan.

Lembar basis data berperan sebagai tempat penyimpanan utama seluruh data pertanahan yang telah dimigrasikan dari arsip manual. Data disusun dalam bentuk tabel dengan struktur kolom yang sistematis dan konsisten, sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pengolahan data secara berkelanjutan. Pemisahan antara lembar formulir dan lembar basis data bertujuan untuk menjaga integritas data, mengurangi risiko kesalahan input, serta memudahkan proses pemeliharaan dan pembaruan data. Dengan struktur ini, perangkat desa dapat melakukan pengelolaan arsip pertanahan secara lebih terorganisasi dan efisien. Struktur kolom data dalam format Excel dirancang berdasarkan kebutuhan administrasi pertanahan desa, yang meliputi identitas wajib pajak, identitas objek tanah, data teknis luas tanah, informasi pajak, serta riwayat perubahan data. Penyusunan struktur data yang konsisten memungkinkan proses pencarian dan penarikan data dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, struktur tersebut juga mendukung kebutuhan pencetakan dokumen administrasi apabila diperlukan dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan kemungkinan kesalahan pencatatan, perancangan format Excel memanfaatkan beberapa fungsi bawaan. Fungsi pencarian data digunakan untuk menarik informasi secara otomatis dari lembar basis data ke lembar formulir pendataan berdasarkan kunci tertentu. Fungsi pengendalian kesalahan diterapkan agar tampilan formulir tetap sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, terutama bagi perangkat desa yang memiliki keterbatasan pengalaman dalam penggunaan teknologi informasi. Selain itu, sistem penomoran otomatis diterapkan untuk menghasilkan format nomor surat yang seragam dan konsisten, sehingga mendukung kerapian serta keteraturan arsip administrasi pertanahan desa. Pemilihan Microsoft Excel sebagai media digitalisasi juga didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya dan kemudahan pengembangan sistem. Excel memungkinkan perangkat desa untuk melakukan pembaruan, penyesuaian, dan pengembangan format pendataan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan administrasi yang berkembang. Dengan perancangan format yang sederhana namun terstruktur, sistem pendataan berbasis Excel ini mampu berfungsi sebagai solusi teknologi tepat guna dalam mendukung digitalisasi administrasi sertifikat tanah di Desa Gintungan, sekaligus menjadi fondasi awal bagi pengembangan sistem administrasi desa berbasis digital di masa mendatang.



Gambar 1.
Sistem Pendataan Berbasis Excel

3. Proses Pendampingan Perangkat Desa

Proses pendampingan perangkat desa dilaksanakan sebagai bagian dari metode pengabdian masyarakat yang diterapkan dalam kegiatan digitalisasi administrasi pertanahan di Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Pendampingan ini dirancang untuk memastikan bahwa format pendataan sertifikat tanah berbasis Microsoft Excel dapat dipahami dan digunakan secara efektif oleh perangkat desa sebagai pengguna utama sistem.

Pendampingan diawali dengan observasi terhadap praktik administrasi pertanahan yang selama ini diterapkan di desa. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi alur kerja pendataan sertifikat tanah serta permasalahan yang muncul dalam sistem pencatatan manual. Hasil observasi menunjukkan bahwa pendataan manual menyulitkan proses pencarian arsip, berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, dan kurang mendukung efisiensi pelayanan publik. Temuan ini menjadi dasar dalam perancangan materi pendampingan dan penyesuaian sistem pendataan digital yang akan diterapkan.

Gambar 2.

Sistem Pendataan Sertifikat Tanah Berbasis Excel Kepada Perangkat Desa

Tahap selanjutnya berupa pengenalan sistem pendataan sertifikat tanah berbasis Excel kepada perangkat desa. Pada tahap ini, mahasiswa pengabdian menjelaskan struktur format pendataan, fungsi masing-masing lembar kerja, serta alur penggunaan sistem secara keseluruhan. Penjelasan diberikan secara bertahap dan kontekstual agar perangkat desa memahami hubungan antara sistem digital yang diterapkan dengan kebutuhan administrasi pertanahan desa. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui praktik langsung dengan menggunakan data administrasi pertanahan desa sebagai contoh. Perangkat desa didampingi dalam proses penginputan data, pencarian arsip, serta pengelolaan dokumen administrasi menggunakan format Excel. Metode praktik langsung dipilih untuk meningkatkan pemahaman teknis dan kemandirian perangkat desa dalam mengoperasikan sistem pendataan digital secara berkelanjutan. Setelah pelatihan, dilakukan proses migrasi data dari arsip pertanahan lama ke dalam sistem digital. Data yang berasal dari buku register dan dokumen fisik dimasukkan ke dalam lembar basis data sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Proses migrasi dilakukan secara bertahap dan disertai dengan validasi data bersama perangkat desa untuk memastikan kesesuaian antara data digital dan arsip fisik. Selanjutnya, sistem diuji coba untuk memastikan fungsi pencarian dan pengelolaan data berjalan sesuai dengan perancangan.

Gambar 3.

Pelaksanaan Pelatihan Dilakukan Melalui Praktik Langsung Dengan Menggunakan Data



Administrasi Pertanahan Desa

4. Dampak Digitalisasi terhadap Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Hasil kegiatan digitalisasi administrasi pertanahan di Desa Gintungan menunjukkan bahwa penerapan pendataan sertifikat tanah berbasis Microsoft Excel memberikan perubahan nyata terhadap tata kelola administrasi desa. Digitalisasi memungkinkan data pertanahan yang sebelumnya tersebar dalam arsip fisik terdokumentasi secara lebih terstruktur dalam satu basis data, sehingga mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi sederhana dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan administrasi desa yang bersifat teknis dan operasional. Dari perspektif pelayanan publik, digitalisasi berdampak pada peningkatan efisiensi pelayanan administrasi pertanahan. Proses pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan sistem manual, sehingga waktu pelayanan kepada masyarakat dapat dipersingkat. Kondisi ini memperkuat peran administrasi pertanahan sebagai instrumen pendukung pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa.

Digitalisasi administrasi pertanahan juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa. Ketersediaan data pertanahan yang rapi dan mudah diakses memudahkan pemerintah desa dalam penyusunan laporan administrasi serta perencanaan pembangunan berbasis data. Dengan demikian, sistem pendataan digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain berdampak pada sistem dan pelayanan, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi. Melalui pendampingan yang dilakukan secara partisipatif, perangkat desa mampu mengoperasikan sistem pendataan digital secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh proses pendampingan yang mampu meningkatkan kompetensi dan kemandirian aparatur desa.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pertanahan melalui pendampingan mahasiswa KPM merupakan pendekatan yang relevan dan aplikatif dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan desa dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Temuan ini memperkuat pentingnya pengembangan teknologi tepat guna yang disertai dengan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai strategi berkelanjutan dalam penguatan administrasi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pertanahan desa yang sebelumnya dilakukan secara manual masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal keteraturan arsip dan efisiensi pelayanan publik. Pendataan sertifikat tanah yang mengandalkan arsip fisik menyebabkan proses pencarian data memerlukan waktu yang relatif lama serta berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan. Penerapan digitalisasi administrasi pertanahan melalui perancangan format pendataan sertifikat tanah berbasis Microsoft Excel menjadi alternatif solusi yang sesuai dengan kondisi sumber daya manusia dan sarana pendukung desa. Sistem pendataan digital yang dirancang secara sederhana dan terstruktur mampu membantu perangkat desa dalam mengelola data pertanahan secara lebih sistematis dan mudah diakses. Pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa KPM melalui pendekatan partisipatif dan praktik langsung berperan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam pengelolaan administrasi pertanahan berbasis teknologi informasi. Secara umum, kegiatan digitalisasi ini menunjukkan potensi dalam mendukung tertib administrasi pertanahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik desa.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, disarankan agar Pemerintah Desa Gintungan dapat melanjutkan pemanfaatan sistem pendataan sertifikat tanah

berbasis digital secara berkelanjutan. Pemutakhiran data secara berkala perlu dilakukan untuk menjaga keakuratan dan keterbaruan data administrasi pertanahan desa. Selain itu, pemerintah desa disarankan untuk secara bertahap mengembangkan penerapan digitalisasi administrasi pada bidang lain yang relevan, seperti administrasi kependudukan dan pengelolaan aset desa, dengan menyesuaikan pada kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. Upaya peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan lanjutan juga perlu dipertimbangkan agar sistem digital yang telah diterapkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagi kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya, disarankan agar pendampingan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga pada pemanfaatan data administrasi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2023). *Kabupaten Purworejo dalam Angka 2023*. Purworejo: BPS Kabupaten Purworejo.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo*. Purworejo.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Widjajanti, K. (2016). Pemberdayaan masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 151–160.